

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCAKONFLIK BERBASIS *MEUNASAH*

**Sabirin**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda  
Aceh

Email: [sabirin.aceh@gmail.com](mailto:sabirin.aceh@gmail.com)

### ***Abstract***

*The province of Aceh, Indonesia, which has been in conflict since 1973 and ended in 2005, was marked by the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) in the city of Helsinki, Finland. During the conflict in Aceh, the joints of life had changed, security was erratic, poverty was rampant, so that to obtain a safe, peaceful, and prosperous life was impossible to achieve. The tsunami disaster on December 26, 2004 further aggravated the lives of the community, both in the socio-cultural, economic and political fields. So that the level of community welfare decreases, which is characterized by poverty and powerlessness. This study aims to look at post-conflict community empowerment in the Data Makmur village, Blang Bintang-Aceh Besar based on meunasah, which is very relevant in finding out the effectiveness of community empowerment in the post-conflict Data Makmur Village. The research method used is "qualitative naturalistic". This research uses a historical, and sociological-anthropological approach. To obtain data, the authors are directly involved in the field through observation, interviews and documentation. The findings in this study are that post-conflict community empowerment in the Data Makmur village is not going as well as expected.*

**Keywords:** Community Empowerment, Conflict, Village and Meunasah.

### **Abstrak**

Provinsi Aceh, Indonesia yang dilanda konflik sejak tahun 1973 dan berakhir pada tahun 2005 ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) di kota Helsinki, Finlandia. Selama konflik berlangsung di Aceh, sendi kehidupan telah berubah, keamanan tak menentu, kemiskinan merajalela, sehingga untuk memperoleh kehidupan yang aman, damai, tentram dan sejahtera, terasa tidak mungkin untuk diraih.

**Diterima:** Januari 2019. **Disetujui:** Februari 2019. **Diterbitkan :** Juni 2019

Bencana Tsunami pada 26 Desember 2004 semakin memperparah kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun, yang ditandai dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemberdayaan masyarakat pascakonflik di *gampong* Data Makmur, Blang Bintang-Aceh Besar berbasis *meunasah*, yang sangat relevan dalam mencari tahu sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat di *Gampong* Data Makmur pascakonflik. Metode penelitian penelitian yang digunakan adalah “kualitatif naturalistik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dan sosiologis-antropologis. Untuk memperoleh data, penulis terlibat langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pascakonflik di *gampong* Data Makmur tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Konflik, *Gampong* dan *Meunasah*.

## **A. Pendahuluan**

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilanda konflik berkepanjangan semenjak tahun 1976 dan berakhir pada tahun 2005 ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) di kota Helsinki, Finlandia. Selama konflik berlangsung di Aceh, banyak sendi kehidupan telah berubah, keamanan menjadi sangat mahal harganya, kemiskinan semakin merajalela, sehingga untuk memperoleh kehidupan yang aman, damai, tentram dan sejahtera, terasa tidak mungkin untuk diraih.

Selain konflik yang melanda Aceh, bencana alam gempa berkekuatan 8,9 pada skala richter yang disusul gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 semakin memperparah kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin

menurun, sehingga banyak masyarakat yang menjadi miskin (kurang beruntung) dan tidak berdaya.

Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor di atas, mengharuskan para pihak yang berkompeten dibidangnya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam segala bidang. Hal ini yang membuat pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya di daerah pascakonflik menjadi menarik untuk diteliti.

Proses pemberdayaan yang dilakukan pascakonflik terhadap masyarakat *gampong* Data Makmur masih kurang tampak, sehingga menjadi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap pemberdayaan masyarakat di *gampong* tersebut. Hal ini diduga karena kurang dilibatkannya *meunasah* secara efektif dalam proses pemberdayaan masyarakat, mengingat betapa dalam sejarah Aceh *meunasah* sangat berperan dalam wujud dan perilaku sehari-hari pada setiap kehidupan masyarakat *gampong* di Aceh.

Keberadaan *meunasah* sangat ditentukan oleh keberadaan masyarakat di suatu daerah dalam komunitas Aceh. Keberadaan *meunasah* akan mampu membawa perubahan --sebagai pelaku perubahan (*agent of change*)-- menjadi lebih maju dan berkembang. *Meunasah* telah banyak berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Aceh, yang bersendikan nilai-nilai religius Islam. Sejarah masa lalu yang cemerlang, mendorong semua pihak untuk mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat yang berbasis *meunasah*,

terutama pascakonflik dan tsunami yang telah memporak-porandakan Aceh.

Tentunya perlu diingat ketika *meunasah* dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, baik sebagai lambang persatuan dan kesatuan umat, ia akan menjadi sumber kekuatan masyarakat dalam mengatur berbagai keperluan adat maupun sebagai pusat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat *gampong*. Semua kegiatan dimulai dari *meunasah* dan juga diakhiri di *meunasah*, baik kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan data empiris dari hasil observasi penulis, menunjukkan bahwa realitas sosial dalam masyarakat Aceh dewasa ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan fungsi dan peran *meunasah* dengan lembaga adat dan pemerintahan lainnya, serta melemahnya nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat terutama sekali pascakonflik. *Meunasah* yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai titik sentral perubahan dalam masyarakat, kini sudah mengalami pergeseran. Bahkan keberadaan *meunasah* juga dipertanyakan peran dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat pascakonflik, sehingga perlu kiranya untuk membuat penelitian terhadap *meunasah* sebagai basis dalam pemberdayaan masyarakat di Aceh pascakonflik, yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat di *Gampong* Data Makmur pascakonflik yang menjadi lokasi dalam penelitian ini.

Penelitian dan teori merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Teori memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian sebagai langkah persiapan pembuka alur pemikiran, juga pematri suatu langkah.<sup>1</sup> Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori yang berasal dari studi kepustakaan yang berfungsi sebagai kerangka teori dalam menyelesaikan penelitian.<sup>2</sup>

Teori sendiri digunakan sebagai awal untuk menjawab pertanyaan penelitian, bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntut penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrument untuk membangun hipoproposal penelitian, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian.<sup>3</sup>

Sejauh amatan penulis, belum ada satupun yang menjelaskan definisi Pemberdayaan masyarakat secara kongkrit. Namun, ada beberapa defenisi yang kiranya menurut penulis dapat mewakili definisi yang lain seperti diungkapkan oleh Zimmerman dalam wrihatnolo, bahwa:

Di tingkat individu, pemberdayaan merupakan pengembangan psikologis yang menggabungkan

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 17.

<sup>2</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi: Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 47.

<sup>3</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2008), h. 26.

persepsi kendali personal, pendekatan proaktif pada kehidupan, dan pengetahuan kritis akan lingkungan sosiopolitis. Pada tingkat organisasi pemberdayaan mencakup proses dan struktur yang meningkatkan keahlian para anggotanya dan memberikan dukungan timbal-balik yang diperlukan oleh anggotanya untuk mempengaruhi perubahan di tingkat masyarakat. Dan di tingkat masyarakat, pemberdayaan berarti tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dan hubungan antar organisasi masyarakat.<sup>4</sup>

Edi Suharto dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat juga menyebutkan bahwa:

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi keperluan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wrihatnolo Randy R., D. Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), h. 179.

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 58.

Masyarakat Aceh sebagai sebuah komunitas yang dikenal cukup relegius, memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam merealisasi itu semua, tidak hanya terhadap Tuhan, namun juga terhadap manusia dan lingkungan. Dalam hal ini Sulaiman Tripa (pegiat kebudayaan Aceh) mengatakan bahwa:

*Meunasah* dalam sejarahnya, merupakan sebagai sentral peradaban masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak sejak usia dini di *gampong*, dididik untuk mengenal penciptanya, untuk mengenal orang tuanya, dan untuk mengenal masyarakatnya. *Meunasah* memperlihatkan tiga dimensi; hubungan manusia dengan Tuhan-nya (*Hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablumminannas*), dan interaksi dalam sebuah lingkungan.<sup>6</sup>

Islam sebagai sebuah ajaran yang *universal* dalam memberikan aturan bagi pemeluknya, memiliki konsep sendiri dalam pemberdayaan masyarakat terutama yang dilanda oleh keterpurukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Ra'adu* ayat 11, disebutkan bahwa:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ...

Artinya: "...*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang*

---

<sup>6</sup> Sulaiman Tripa dalam: [www.acehinstitute.org/meunasah](http://www.acehinstitute.org/meunasah). di akses pada tanggal 03 Juli 2008.

*ada pada diri mereka sendiri...”*. (Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1989)

Ayat di atas memberikan gambaran tentang konsep perubahan masyarakat (*tgzir*), yang menurut M. Quraisy Syihab ditafsirkan sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia sebagai pelaku perubahan. Dalam posisinya sebagai pelaku perubahan, disamping manusia berperan sebagai totalitas atau manusia sebagai wujud pribadi-pribadi personal, dalam ayat tersebut manusia juga diposisikan sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat. Pemakaian kata *qaum* menunjukkan bahwa proses perubahan yang dimaksudkan dalam ayat 11 surat *Ar-Ra'du* adalah sebuah proses perubahan masyarakat (sosial).<sup>7</sup>

Berdasarkan surat *Ar-Ra'du* ayat 11, teridentifikasi bahwa ada dua hal pokok dalam proses perubahan sosial menurut Islam. *Pertama* Islam memandang bahwa perubahan sosial haruslah dimulai dari individu (*Ibda' Binafsih*), dimulai dari diri sendiri. *Kedua* secara berangsur-angsur, perubahan individu ini harus disusul dengan perubahan struktural. Perubahan yang kedua ini menurut penulis adalah perubahan secara berjamaah, yang sudah distrukturkan secara lebih baik. Ayat di atas juga menyiratkan bahwa betapa klien (objek yang ingin diberdayakan) sangat mempengaruhi terhadap perubahan

---

<sup>7</sup> M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-10, (Bandung: Mizan, 1995), h. 245.



yang diinginkan, tentunya klienlah yang sangat paham dan tahu apa yang terbaik bagi dirinya, bukan orang atau pihak lain.

Semua teori yang disebutkan di atas akan dijadikan kerangka pikir untuk memotret, membedah dan menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat pascakonflik berbasis *meunasah*, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kualitatif naturalistik”, --Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya, ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami dan natural”. dengan sifatnya ini maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan, tidak seperti penelitian kuantitatif yang dapat mewakili orang lain untuk menyebarkan angket atau melakukan wawancara terstruktur--.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan historis, dan sosiologis-antropologis.

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Besar, yang secara khusus di *gampong* Data Makmur Kecamatan Blang

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 11-12.

Bintang. Data Makmur merupakan *gampong* yang mengalami konflik bersenjata secara langsung, dan termasuk wilayah hitam dalam catatan pihak TNI/Polri. *Gampong* yang berdekatan (bersebelahan) dengan pegunungan ini berbatasan dengan beberapa Kecamatan lainnya seperti Montasik, Masjid Raya dan Kuta Baro

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dapat dikelompokkan menurut cara pengumpulannya menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>9</sup> Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung, dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau oleh lembaga lain, baik berbentuk buku, laporan penelitian, maupun dokumen lainnya. Untuk memperoleh data tersebut, penulis juga mempergunakan literatur-literatur kepustakaan (*Library Research*). Langkah kongkritnya adalah dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan tema penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap, dalam penelitian ini penulis menempuh beberapa tahapan dalam pengumpulan data diantaranya melalui observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.

Adapun yang menjadi sumber data melalui wawancara dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang, yaitu *geusyik gampong* 1 orang, *tuha peuet* 2 orang, korban konflik 2 orang, dan masyarakat biasa

---

<sup>9</sup> Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 195.

sebanyak 2 orang. Kemudian akan diperkuat oleh data hasil observasi dan dokumen lainnya sebagai data penunjang.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kualitatif maka prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga cara, yaitu: observasi, dokumentasi dan interview. Metode dimaksud sebagai mana yang akan penulis uraikan berikut ini:

#### a. Observasi

Observasi atau yang sering disebut pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian.<sup>10</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi penelitian mengenai kenyataan yang terjadi di dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat pascakonflik berbasis *meunasah* dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terlibat langsung ke lokasi penelitian, untuk mendapatkan data kongkrit maka dipandang peneliti perlu terlibat langsung ke lokasi penelitian. Sasaran *observasi* adalah segenap komponen masyarakat *gampong* yang menjadi objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak serta

---

<sup>10</sup> Consuelo G. Sevilla dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 198.

pihak lain yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Observasi ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, partisipan, kegiatan (aktivitas) termasuk kejadian atau peristiwa penting yang dilakukan oleh partisipan serta kapan kegiatan itu dilakukan, sikap, perasaan, pandangan partisipan yang ditunjukkan melalui ungkapan, ekspresi wajah atau tindakan lain.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.<sup>11</sup> Dalam hal ini juga termasuk bahan-bahan yang terdapat di dunia maya, seperti di internet yang relevan dengan tema penelitian.

#### c. *Interview*

Teknik interview atau wawancara dilakukan dengan para responden yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian, sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam proses wawancara penulis akan menggunakan pedoman wawancara “tidak terstruktur”, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Karena interview ini cocok untuk

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 2.

penelitian kasus.<sup>12</sup> Dalam melakukan wawancara ini peneliti akan mengikuti metode wawancara mendalam atau *in-depth interview*.<sup>13</sup> Secara umum wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>14</sup>

Dalam rangka penelitian masyarakat yaitu penelitian yang berhadapan langsung dengan personil, menurut Koentjaraningrat ada dua macam wawancara yang pada dasarnya berbeda sifatnya, yaitu; *Pertama*: wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data-data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi. *Kedua*: wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang diwawancarai untuk keperluan komparatif. Golongan pertama disebut informan dan golongan kedua disebut sebagai responden.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 202.

<sup>13</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2008), h. 108.

<sup>14</sup> *Ibid.*..., h. 108.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h. 130. Lihat juga P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 42.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam wawancara mendalam yaitu penyamaran dan terbuka.<sup>16</sup> Kedua cara ini penulis gunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan kondisi lapangan untuk mendapatkan data yang objektif. Penyamaran adalah pewawancara menyamar sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang hidup dan beraktivitas dengan wajar bersama orang yang diwawancarai.

Wawancara terbuka dilakukan secara terbuka dimana informan atau responden mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara. Alat bantu wawancara yang dikenal dalam praktek penelitian, pada dasarnya meliputi dua jenis yaitu; pedoman wawancara dan daftar pertanyaan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara, karena hal ini lebih memudahkan penulis dalam melakukan wawancara baik dengan informan maupun responden.

Untuk menentukan sampel (orang yang dijadikan responden atau informan), maka peneliti menggunakan sampling bertujuan atau *purposive sampling*.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih secara sengaja menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menjadikan warga *gampong* sebagai informan atau responden. Namun juga menggunakan pihak

---

<sup>16</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: ...*, h. 109.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam ...*, h. 43-44.

<sup>18</sup> Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 231.

lain yang dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Banyak fenomena sosial dalam masyarakat yang saban hari dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian harus kita terima sebagai fakta sosial yang turut mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan ini. Gambaran umum di atas juga berlaku dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yang kemudian dapat kita ukur sejauhmana efektifitas pemberdayaan masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian (*research*) ini. Di sini peneliti mencoba melihat 3 hal penting dalam rangka melihat evektifitas pemberdayaan masyarakat di daerah pasca konflik, yaitu *pertama* gambaran umum lokasi penelitian, *kedua gampong* Data Makmur dan konflik, dan ketiga efektifitas pemberdayaan masyarakat pasca konflik, sebagaimana akan penulis uraikan di bawah ini:

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

*Gampong* Data Makmur Kemukiman<sup>19</sup> Sungai Makmur, yang secara administratif menjadi salah satu *gampong* di Kecamatan Blang

---

<sup>19</sup> Kemukiman adalah suatu institusi lokal (*local wisdom*) dalam masyarakat Aceh, setelah institusi *gampong* dengan segenap perangkat adatnya. Kemukiman merupakan wilayah administrasi masyarakat adat yang di dalamnya terkumpul beberapa buah *gampong*, sementara untuk sebuah kecamatan umumnya terdiri dari beberapa buah kemukiman. Unsur yang memimpin kemukiman merupakan perwakilan beberapa buah *gampong* yang terkumpul dalam kemukiman tersebut, untuk kemudian memilih perwakilan mereka menempati posisi adat berupa imeum mukim, sekretaris mukim dan

Bintang memiliki kekhasan yang berbeda dengan *gampong-gampong* lainnya di Kecamatan Blang Bintang. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka peneliti kiranya perlu mengupas secara singkat tentang gambaran umum lokasi penelitian sehingga para pembaca sekalian juga akan dapat merasakan nuansa *gampong* Data Makmur sebagaimana dalam uraian di bawah ini:

#### a. Keadaan Geografis

*Gampong* Data Makmur merupakan *gampong* terluas yang terdapat di Kecamatan Blang Bintang, yaitu mencapai 900 Ha dari total luas Kecamatan Blang Bintang yang mencapai 10.800 Ha. Dengan luas sebagaimana disebutkan di atas Kecamatan Blang Bintang memiliki jumlah penduduk mencapai 10.197 orang, yaitu 5.257 jiwa laki-laki dan 4.940 jiwa perempuan, dengan 2.194 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 3 kemukiman dalam 26 buah *gampong*.<sup>20</sup> Dari jumlah total 900 Ha sebanyak lebih dari 50% nya adalah lahan pertanian yaitu untuk sawah dan ladang, yang masing-masing 257 Ha dan 260 Ha.

Berdasarkan amatan peneliti, *gampong* Data Makmur sangat berdekatan dengan pegunungan Blang Bintang, dan bahkan sebagian

---

struktur lain di bawahnya. Pada masa orde baru, kemukiman dihapus (tidak diakui dalam struktur pemerintahan); namun pasca reformasi dan ditambah lagi dengan Undang-undang pemerintah Aceh (UUPA), kemudian mengakomodir kembali kelembagaan adat tersebut menjadi bagian penting dalam tata pemerintahan di Aceh.

<sup>20</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Blang Bintang dalam Angka 2010, (Aceh Besar: Sekretariat Daerah Aceh Besar, 2010), h. 26.



besar wilayah *gampong* terdiri dari sawah, ladang dan pegunungan.<sup>21</sup> *Gampong* Data Makmur secara khusus berbatasan dengan kecamatan Krueng Raya dan Kecamatan Montasik, hal ini dikarenakan *gampong* ini adalah perbatasan Kecamatan Blang Bintang dengan dua Kecamatan tersebut. Jarak antara *gampong* Data Makmur dengan pusat Kecamatan sekitar 7 km, yang dapat dilalui dengan menggunakan kendar roda empat, dengan kondisi jalan beraspal. Pada tahun 2003 *Gampong* Data Makmur yang sebelumnya menjadi bagian dari Kecamatan Montasik bergabung dengan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Blang Bintang, yang merupakan hasil pemekaran dari 3 Kecamatan yaitu Montasik, Kuta Baro, dan Ingin Jaya. Batas wilayah Kecamatan Blang Bintang sendiri dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan: Kecamatan Ingin Jaya
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Kecamatan Krueng Raya
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan Montasik
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Kuta Baro

Sementara itu *gampong* Data Makmur sendiri berbatasan langsung dengan pegunungan dan *gampong* lainnya, sebagaimana penulis gambarkan berikut ini:

---

<sup>21</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan *Keuchik* Zami (Mantan Pj. *Keuchik* masa-masa berakhirnya konflik, 2004-2005), pada tanggal 20 Agustus 2014.

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan: *gampong* Kayee Kunyeet
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: pegunungan Kecamatan Krueng Raya
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan: *gampong* Peurumping Kecamatan Montasik
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan: *gampong* Kayee Kunyeet

*Gampong* Data Makmur menjadi *gampong* yang sangat strategis dalam Kecamatan Blang Bintang, hal ini dikarenakan selain *gampong* yang cukup luas juga terdapat lahan produktif yang jika dapat dikelola dengan baik maka akan mendatangkan pendapatan (*income*) bagi masyarakatnya. Sawah dengan irigasi yang cukup baik memungkinkan hasil panen yang maksimal dengan pola musim tanam 2 kali dalam 1 tahun. Ladang dan kebun yang terhampar luas juga menjadi potensi yang cukup baik untuk kemudian dikembangkan dalam berbagai jenis usaha produktif bagi masyarakatnya. Hal ini merupakan kondisi ideal untuk daerah masyarakat agraris yang secara umum hidup dari usaha bercocok tanam (bertani), sebagaimana yang umumnya menjadi pekerjaan masyarakat *gampong* Data Makmur. Secara umum *gampong* ini memiliki tanah yang sangat subur dan mengandung potensi alam yang luar biasa banyaknya, termasuk bahan galian C (pertambangan) yang tersedia dengan cukup di pegunungan Blang Bintang, terutama yang termasuk dalam wilayah *gampong* Data Makmur.

Letak *gampong* Data Makmur yang strategis tersebut juga bernilai positif sekaligus negatif bagi warga dan pihak-pihak tertentu lainnya dalam memanfaatkan alam ini. Pegunungan yang masih alami tersebut menjadi tempat yang sangat strategis di masa konflik bagi pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berlindung dan mempertahankan dirinya dari serangan pihak TNI/Polri. Di sisi yang lain pihak TNI/Polri juga memanfaatkan kawasan *gampong* sebagai posko dan juga tempat berlindung, setelah dan atau berposko (ngedrop pasukan) untuk melakukan perburuan terhadap pihak GAM (di masa konflik). Wilayah *gampong* ini juga menjadi wilayah transit pasukan GAM yang hendak ke wilayah Cot Keueng (Kecamatan Kuta Baro), wilayah Montasik dan juga wilayah Indrapuri.

#### b. Mata Pencaharian

Sebagaimana penulis pernah singgung di atas, masyarakat *gampong* Data Makmur 95% berprofesi sebagai petani, selebihnya pekerja bangunan, tukang, pedagang, peternak, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian, meskipun mereka berprofesi selain sebagai petani ternyata mereka juga berprofesi ganda, yaitu sebagai petani sawah dan berkebun. Sebagai petani, mereka merupakan petani menggunakan pola tradisional yang sudah mulai menggunakan teknologi modern dalam usahanya, misalkan sudah menggunakan mesin bajak sawah (*hand tractor*) dan juga mesin perontok padi, demikian juga dalam sistim pengangkutan dan penggilingan padi menjadi beras sudah menggunakan mesin yang modern yaitu mobil

pengangkut padi dan mesin penggiling padi di pabrik penggilingan padi.

Pekerja bangunan umumnya hanya menjadi buruh kasar dalam membantu tukang untuk membuat rumah penduduk lokal dan sekitar, sementara tukang yang jumlahnya sangat sedikit itu lebih bersifat sebagai konsultan pembangunan dalam skala kecil selain dia juga berperan sebagai tenaga praktis yang hampir sama dengan pekerja bangunan lainnya. Sesekali mereka mendapatkan pekerjaan di luar *gampongnya*, yang biasanya berupa proyek pemerintah seperti pembuatan saluran, jembatan dan gedung-gedung lainnya yang membutuhkan pekerja bangunan dan tukang.<sup>22</sup>

Sementara itu pedagang di *gampong* ini terbagi dalam 2 jenis perdagangan, pertama pedagang barang eceran untuk keperluan warga meskipun barang-barang yang tersedia sangat terbatas. Yang kedua adalah pedagang minuman di warung kopi (warkop) *gampong* setempat, dari 4 buah warkop yang ada berdasarkan amatan penulis hanya satu warkop yang terlihat banyak disinggahi oleh para pelanggan. Sementara ketiga warkop lainnya dalam kondisi 'hidup enggan mati tak mau', meskipun sebagai warkop ketiganya juga berfungsi ganda sebagai warung (*keudee*) barang eceran.

Baik warkop (warung kopi) dan *keudee* (toko) barang eceran sama-sama memiliki keterbatasan dalam hal barang atau keperluan yang diperlukan oleh warga, sehingga terhadap keperluan yang tidak

---

<sup>22</sup> Wawancara dilakukan dengan AZ (responden mau namanya disamarkan) pada tanggal 2 Oktober 2014 di *gampong* Data Makmur

terpenuhi tersebut mereka mencarinya di luar *gampong*, seperti di pasar Cot Meuraja yang jaraknya sekitar 7 km, pasar Cot Seusroeh yang jaraknya sekitar 5 km, bahkan juga ke pasar Lam Ateuk dan pasar Induk Lambaro yang jaraknya masing-masing sekitar 10 km dan 15 km.

Para peternak umumnya mereka beternak sapi dan kerbau, sementara ada juga yang memelihara kambing sebagai sampingan. Peternak di sini tentu berbeda dengan peternak yang memiliki usaha peternakan besar sebagai tumpuan hidupnya. Masyarakat di *gampong* ini meskipun memiliki usaha peternakan sapi atau kerbau di atas 5 atau di atas 10 ekor, mereka juga tetap tidak meninggalkan tradisi bertani (menanam padi) yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa dikatakan meskipun mereka sebagai peternak, namun juga sebagai petani sawah dan ladang maupun kebun. Sementara PNS ada 2 orang sebagai guru, dan selain sebagai guru mereka juga sebagai petani sama halnya dengan petani lainnya. Di *gampong* ini juga terdapat pekerja musiman, yaitu sebagai pekerja pada mesin perontok padi yang dalam setahun 2 kali panen.

### c. Kondisi Sosial Budaya

*Gampong* Data Makmur memiliki satu bangunan *meunasah* yang terletak di tengah-tengah *gampong*, dengan konstruksi bangunan terbuat dari beton, berlantai keramik, dengan dinding setengah beton dan setengahnya lagi terbuat dari terali besi yang memudahkan angin keluar masuk *meunasah*, dan beratapkan seng. Di dalamnya juga

terdapat sebuah ruangan berbentuk kamar yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan alat-alat pengeras suara, keperluan *meunasah* lainnya serta sebagai kantor geuchik, menggantikan kantor geuchik sebelumnya yang terdapat di luar *meunasah*. Ini tentu berbeda dengan bangunan awal yang terbuat dari kayu gunung dan beratapkan daun rumbia, sebagaimana umumnya bangunan *meunasah* tempo dulu di Aceh.

Dalam kompleks *meunasah* terdapat bangunan tempat wudhuk (*kulah*) yang sudah beratapkan seng, di sampingnya sekitar 2 meter terdapat toilet yang kondisinya kelihatan kurang terawat dengan baik. *Meunasah* ini memiliki pagar cukup bagus yang terbuat dari beton mengelilingi kompleks *meunasah*. *Meunasah* dikelilingi oleh perumahan penduduk yang juga berdekatan dengan pos kesehatan desa (poskesdes), di hadapan *meunasah* itu terdapat sebuah pohon asam jawa (tepatnya di tepi jalan) yang cukup besar yang diperkirakan berumur mencapai 80 tahun, dan di bawah pokok asam tersebut berdiri sebuah pos jaga (berukuran 3 m x 3,5 m) yang biasanya ramai disinggahi para remaja *gampong* setempat.

Selain *meunasah* juga terdapat 2 buah balai pengajian milik pribadi yang difungsikan sebagai sarana umum untuk kegiatan keagamaan yaitu sebagai tempat belajar-mengajar pengajian al-qur'an dan kitab-kitab agama untuk anak-anak secara khusus dan masyarakat Data Makmur pada umumnya. Meskipun jarak antara satu balai pengajian dengan balai pengajian lainnya tidak terlalu jauh hanya

berjarak sekitar 100 meter, namun tidak ada masalah antara kedua orang pimpinan balai pengajian (merangkap tenaga pengajar) tersebut.

Kondisi ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat memilih mau belajar mengaji dimana, dan juga bisa untuk saling menutupi kekurangan antara keduanya ungkap teungku Murdani yang akrab dipanggil dengan t<sup>gk</sup> Abang.<sup>23</sup> Bangunan balai ini sangat sederhana yang terbuat dari kayu, berlantai papan, dengan dinding sekitar 50 cm dan selebihnya terbuka tanpa dinding selain arah kiblat yang berdinding kayu sampai mendekati atap, dan balai ini beratapkan daun rumbia. Konstruksi bangunan ini menjadikan balai pengajian ini terasa amat sejuk dan segar meskipun ditengah teriknya matahari, terlebih lagi di balai teungku adun yang di sekelilingnya terdapat beberapa pohon besar dan rindang.

Meskipun tidak ada sekolah satupun di *gampong* ini, namun anak-anak mendapat pendidikan minimal sampai tingkat SMP dan sebagian lagi sampai tingkat SMA, hanya sebagian kecil saja yang melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang kuliah sebagai mahasiswa di beberapa kampus yang ada di banda Aceh.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan SMP, warga dapat memanfaatkan fasilitas yang terdapat di *gampong* tetangga yang tidak begitu jauh dari *gampong* Data Makmur, berjarak sekitar 1 sampai 2 km. Sementara untuk melanjutkan ke jenjang SMA harus menempuh jarak 5 sampai

---

<sup>23</sup> Responden adalah salah seorang pimpinan balai pengajian di *gampong* Data Makmur, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2014.

7 km dari *gampong*, hal ini pula yang menyebabkan tidak banyak yang menyelesaikan sekolah pada tingkat tersebut selain disebabkan persoalan ekonomi masyarakat yang tergolong miskin. Dari total penduduk *gampong* 685 jiwa yang terdiri dari 337 jiwa laki-laki dan 348 jiwa perempuan, hanya 7 jiwa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Kehidupan masyarakatnya terlihat sangat bersahaja, dipagi hari mereka ke sawah maupun ke ladang atau kebun dan menjelang sore hari pulang ke rumahnya masing-masing, sebagian lagi ada yang pulang menjelang waktu shalat zuhur dan kembali ke aktivitasnya selepas shalat zuhur sekitar jam 14.00 wib. Demikian juga dengan para pedagang di waktu pagi bersiap-siap dengan segala aktifitasnya, dalam menyiapkan keperluan para pelanggannya. Anak-anak di pagi hari terlihat ada yang menggunakan sepeda dan sebagian lagi diantar oleh orang tuanya ke sekolah, juga ada sebagian yang berjalan kaki menuju sekolahnya di *gampong* tetangga.<sup>24</sup>

Jika kehidupan keberagamaan di *meunasah* dijadikan sebagai sebuah alat ukur, maka berdasarkan beberapa kali observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang responden didapati bahwa warga sudah kurang antusias dalam memanfaatkan *meunasah* sebagai media beribadah, sekurang-kurangnya kondisi ini sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir, dimana kegiatan shalat magrib secara berjamaah sudah sangat jarang dilakukan di *meunasah* dan walaupun ada yang shalat di *meunasah* umumnya shalat secara sendiri-sendiri.

---

<sup>24</sup> Observasi dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2014



Pada saat adanya mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) baru jamaah shalat di *meunasah* hidup lagi, hal ini dikarenakan mahasiswa yang laki-laki tinggal di *meunasah* dan menjadikan *meunasah* sebagai pusat kegiatan mereka. Bangunan *meunasah* sudah cukup bagus, namun warga yang datang ke *meunasah* yang sedikit. Bahkan beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan terlihat lebih banyak warga di warkop dan tempat keramaian lainnya daripada *meunasah*, hal ini juga didukung oleh ketersediaan tempat shalat di warkop misalnya meskipun masih sederhana sekedar sajadah saja.

Hubungan dalam masyarakat dalam beberapa hal terlihat cukup baik, misalkan dalam hal tahlilan orang meninggal. Pelaksanaan tahlilan dilakukan dari malam pertama yang dimulai di *meunasah*, dan malam-malam selanjutnya sampai malam ke 10 di rumah duka dengan dihadiri oleh warga secara antusias. Tidak hanya itu, makanan dan minuman untuk kegiatan tahlilan tersebut juga menjadi tanggungan warga lainnya yang tidak terkena musibah. Secara teknis mereka membagi jadwal kepada segenap kepala keluarga (KK), untuk menjadwalkan waktu memberikan sedekah kepada keluarga yang terkena musibah (orang meninggal) sampai malam yang kesepuluh, sehingga semua KK yang ada di *gampong* tersebut kebagian jadwal yang ditetapkan.<sup>25</sup> Kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah ditetapkan warga dalam rapat

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Tgk. Murdani pada tanggal 2 Oktober 2014 di salah satu balai pengajian *gampong* Data Makmur.

yang telah diselenggarakan secara bersama-sama di *meunasah*, dan sudah menjadi tradisi lama yang sampai saat ini masih bertahan dengan baik.

Pola hidup masyarakat di *gampong* ini masih sangat sederhana dengan luas alam membentang yang kemudian menciptakan mereka menjadi masyarakat agraris dengan menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian. Masyarakatnya juga begitu mudah menerima pihak lain yang datang, menjadikan *gampong* ini sebagai *gampong* transit bagi para pihak yang bertikai sekalipun, mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatakan ya ataupun tidak. Sehingga sangat wajar sekali jika pada masa konflik *gampong* ini menjadi salah satu *gampong* yang menjadi basis pergerakan GAM yang sekaligus menjadi incaran (daerah operasi) yang kerap sekali didatangi pasukan TNI/Polri dan bahkan pada masa darurat sipil, di *gampong* ini juga didirikan pos Brimob dan juga menjadi jalur utama yang dilalui pihak GAM dari gunung turun ke pemukiman warga. Itu menjadi bagian dari sejarah masa lalu yang juga sering terdengar dalam pembicaraan di saat mengenang masa konflik dahulu.<sup>26</sup> Sisa-sisa di masa konflik inilah yang saat ini meneruskan perjuangan dalam membangun dirinya, keluarga dan *gampong* yang nanti akan peneliti uraikan lebih lanjut dalam pembahasan yang sangat sederhana ini.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Syarifudin Sufi (mantan *keuchik* disaat sedang berkecamuknya konflik di Aceh dan di Data Makmur tentunya), pada tanggal 20 Agustus 2014.

## 2. *Gampong* Data Makmur dan Konflik

*Gampong* Data Mamkur sebagaimana telah penulis ungkapkan sebelumnya adalah *gampong* dengan daerah teritorial yang sangat luas dalam Kecamatan Blang Bintang. *Gampong* ini memiliki lahan pegunungan yang cukup luas dengan hutan-hutan kecilnya, sebagai tempat berlindung kelompok GAM dan menjadi tempat transit para pasukan GAM yang melakukan perjalanan dari arah Montasik-Indrapuri menuju Cot Keueng dan demikian juga sebaliknya, maupun GAM yang ada di wilayah Aceh Besar serta GAM yang diperbantukan (di BKO-kan) ke wilayah Aceh Besar.<sup>27</sup> Hal ini pula yang kemudian dilirik oleh pihak TNI/Polri untuk menjadikan *gampong* ini sebagai wilayah operasi guna mencegat dan atau menangkap (melumpuhkan) pihak GAM dalam kondisi hidup atau mati. Dengan adanya pergulatan antara kedua kekuatan ini dimasa konflik telah membuat *gampong* ini yang sedianya adem-ayem penuh ketentraman dan kenyamanan berubah menjadi salah satu medan tempur di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam konteks pemerintahan *gampong* pada masa konflik, di *gampong* ini nyaris lumpuh total. Secara struktur pengurus *gampong* ada, namun dalam realitanya tidak berjalan maksimal disebabkan adanya kekuatan lain yang selalu melakukan penekanan kepada pemerintahan *gampong* ini. Pada masa konflik nyaris tidak ada rapat di *meunasah* yang diselenggarakan oleh pemerintahan *gampong*, dikarenakan daerah ini mengalami konflik yang cukup serius. Pihak

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan *Keuchik* Suwandi dan *Keuchik* Zami pada tanggal 20 Agustus 2014.

aparatus keamanan selaku penguasa daerah waktu itu tidak memperbolehkan orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, belum lagi kecurigaan banyak pihak (baik TNI/Polri maupun pihak GAM sendiri) terhadap orang yang berkumpul dalam jumlah yang banyak kemudian mematikan ide ataupun gagasan untuk membuat pertemuan maupun rapat di *gampong*. Akhirnya untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar dan meminimalisir kemudharatan maka rapat atau pertemuanpun tidak dilakukan ungkap geuchik Zami.

Terkait dengan kondisi ini, tidak ada pilihan lain baik bagi pengurus *gampong* maupun warga masyarakatnya selain mengikuti irama gendang perang yang telah ditabuhkan oleh kedua pihak yang bertikai (TNI/Polri dan GAM), demikian juga masyarakat sipil yang telah memilih menjadi dirinya sendiri harus menerima resiko berada dan hidup ditengah-tengah konflik bersenjata. Sebagai masyarakat biasa mereka tidak memiliki banyak pilihan selain tetap bertahan di tanah kelahirannya, meskipun kenyamanan dan keselamatan mereka sewaktu-waktu bisa terancam. Ini menjadi bagian dari sejarah kehidupan mereka yang harus ditelan meskipun teramat sangat pahit rasanya, dalam mengarungi samudera kehidupan di masa konflik berkecamuk.

Sebagian dari warga telah kehilangan anak, saudara, abang maupun teman bermainnya akibat konflik bersenjata tersebut. Setidak-tidaknya terdapat 5 orang warga *gampong* ini yang menjadi korban meninggal akibat konflik dari tahun 2002 sampai tahun 2004, yang salah satunya merupakan anak kandung responden dalam penelitian

ini.<sup>28</sup> Kelima nama yang dimaksud adalah Muhtadin (2002), Rusdi (2003), Sugiran (2003), Muslim (2004), dan Basiran (2004). Selain korban meninggal, juga terdapat warga lainnya yang menjadi korban pemukulan maupun penganiayaan yang sampai hari ini masih merasakan dampaknya baik secara fisik maupun secara psikis (kejiwaan). Secara fisik adanya beberapa anggota masyarakat yang mengalami cacat tubuh permanen, dan secara psikis adanya warga yang trauma dan juga terganggu kejiwaannya yang menyebabkan kehidupan korban menjadi tidak normal. Secara umum korban penyiksaan jauh lebih banyak, hal ini salah satunya disebabkan adanya pos Brimob/Polisi dan TNI yang masing-masing berposko di kawasan *gampong* Data Makmur (berdekatan dengan arah menuju pegunungan) dan di *gampong* Kayee Kunyet yang menjadi pintu masuk menuju *gampong* Data Makmur.

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh, terutama saat diberlakukan darurat sipil telah menjadikan *gampong* Data Makmur sebagai salah satu daerah yang menjadi medan konflik antara kedua kelompok kekuatan bersenjata. Kondisi ini telah melumpuhkan

---

<sup>28</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan *Keuchik* Syarifudin Sufi yang ditemani Istrinya Nyak Ubit, sambil menceritakan tentang kronologi kematian anaknya. Beliau juga mengatakan betapa pahitnya hidup pada zaman konflik, mereka sering mendapat teror dari kedua belah pihak (secara mental maupun fisik) baik dalam posisinya sebagai *keuchik* di masa konflik maupun posisinya sebagai orang tua dari anak yang terlibat dalam GAM. Yang kemudian beliau mengakhirinya dengan kalimat syukur, bahwa kini eranya sudah berubah dan perdamaian menjadi nyata untuk kita rawat dan jaga bersama-sama agar kehidupan aman dan damai ini dapat terus dirasakan sampai generasi penerus kita nantinya.

kegiatan pemerintahan *gampong* dan segenap kreatifitas seni-budaya warganya, sehingga berdampak pada melemahnya nilai-nilai seni dan budaya serta semangat kehidupan keberagamaan dalam memanfaatkan *meunasah* sampai saat ini, meskipun bukan disebabkan oleh satu faktor (konflik) saja.

Namun yang pasti, sedikit banyaknya konflik masa lalu di *gampong* Data Makmur turut memberi kontribusi terhadap melemahnya semangat kebersamaan dan mudahnya kultur (budaya) masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Salah satunya adalah terganggunya komunikasi dan silaturahmi warga masyarakat yang tergambar dari wujud praktik keagamaan dalam kebersamaan yaitu shalat magrib secara berjamaah dan semangat mengunjungi atau meramaikan *meunasah* dengan segenap aktifitas di dalamnya.

### 3. Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik

Beberapa informasi yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa informan bahwa sebelum (pra) konflik kegiatan kepemudaan terutama dalam bidang sosial keagamaan, seperti seni islami dalail khairat masih aktif di *meunasah*, namun pascakonflik kegiatan ini menjadi tidak ada lagi.<sup>29</sup> Pemberdayaan masyarakat dalam bidang seni budaya dengan memanfaatkan media *meunasah* memang tidak ada lagi (setidaknya pada saat penelitian ini dilakukan), hal ini kemudian membuat *meunasah* menjadi sepi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh semakin banyaknya fasilitas lain yang kini secara

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan *Keuchik* Syarifudin Sufi.

perlahan mencoba menggantikan kedudukan dan peran *meunasah* dalam masyarakat, yang diperparah lagi oleh terjadinya ketimpangan struktur dalam masyarakat sebagai akibat langsung dari kekosongan posisi *teungku imeum meunasah* yang sedianya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di sebuah *gampong*.

Kondisi di atas sebagaimana disampaikan oleh *teungku Bustami* bahwa saat ini tidak ada *teungku imeum meunasah* yang resmi, karena *teungku imeum meunasah* yang sebelumnya mengundurkan diri, disebabkan pihak keluarga tidak tahan dengan isu maupun gosip dan bahkan fitnah yang didapatkan oleh pihak keluarga *teungku imeum* dari individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pilihan mundur ini kemudian menyebabkan beberapa orang lainnya yang memiliki kemampuan untuk menduduki posisi *teungku imeum meunasah* tersebut juga menjadi enggan dan tidak mahu menerima jabatan yang diberikan warga, karena dikhawatirkan akan mengalami nasib yang sama dan tidak tahan terhadap isu maupun gosip yang lebih mengarah pada fitnah.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan media *meunasah*, kemudian Pasca konflik beralih ke media lainnya yaitu dengan lahirnya balai pengajian (*balee suemeubeut*). Media ini sepenuhnya milik pribadi masyarakat meskipun dalam pembangunannya juga dibantu oleh warga yang umumnya juga memiliki kepentingan, sebagai tempat anak-anaknya belajar mengaji. Munculnya 2 buah *Balee Seumeubeut* ini masing-masing berada di

bawah kendali teungku Ikhtiar dan teungku Murdani yang sekaligus sebagai pemilik dan pengajar bagi anak-anak yang belajar di *balee seumeubeut* ini.<sup>30</sup> Hal ini pula yang kemudian menyebabkan fungsi maupun peran *meunasah* sebagai media pembelajaran Al-Qur'an dan kitab-kitab arab-jawo lainnya menjadi hilang dari *meunasah*, berpindah ke *balee suemeubeut*.

Alternatife dilahirkannya *balee suemeubeut* dengan anggapan akan lebih mudah dalam mengelola para santri, waktu pembelajaran Al-Qur'an maupun kitab-kitab kepada para santri, serta yang paling penting adalah adanya rasa nyaman yang dirasakan oleh santri maupun *teungku suemeubeut* dalam proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan transfer nilai (*transfer of value*). Misalnya teungku lebih leluasa dalam membuat aturan yang terkait dengan proses belajar-mengajar, namun lain halnya jika dilaksanakan di *meunasah* maka akan terkendala karena sebagai tempat umum yang memungkinkan semua orang menggunakan fasilitas publik ini secara bersamaan.

Selain suasana *gampong* yang tidak begitu baik (kurang bersahabat) untuk saat ini dalam hal pemanfaatan *meunasah* oleh *teungku suemeubeut*, ditambah lagi dengan kondisi anak yang sudah kurang patuh dan orang tua yang kurang peduli dengan pendidikan anak, sehingga mengajar mengaji di *balee seumeubeut* menjadi pilihan yang lebih tepat. Karena jika di *balee suemeubeut* teungku memiliki

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan *Keuchik Syarifudin Sufi*.



hak dan kekuasaan penuh dalam menerapkan aturan untuk mendidik dan mengajar anak didiknya.<sup>31</sup> Di sinilah letak keberdayaan *teungku suemeubeut* dalam mengajarkan murid-muridnya belajar ilmu agama, sehingga diharapkan akan lebih maksimal dan masyarakat dapat terdidik dengan baik meskipun keberadaan *meunasah* mulai sepi oleh keramaian warganya dalam belajar Al-Qur'an.

Pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi sedikit terganggu akibat lemahnya manajemen administrasi *gampong* yang disebabkan Sekretaris Desa (Sekdes) yang diangkat menjadi PNS adalah orang yang pernah menjadi korban kekerasan (penganiayaan) di masa konflik, yang kemudian mengalami sedikit masalah dengan psikis (kejiwaan)-nya.<sup>32</sup> Namun karena dianggap sudah lama sebagai sekdes dan mencukupi syarat (menjabat sekdes lebih 5 tahun berturut-turut) untuk diangkat sebagai PNS sekaligus untuk membantu yang bersangkutan dan pihak

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan *Keuchik* Suwandi.

<sup>32</sup> Pengangkatan Sekdes menjadi PNS ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang mem PNS kan sekdes secara bertahap diseluruh Indonesia. Karena persyaratan utamanya adalah harus Sekdes aktif dan menjadi Sekdes minimal 5 tahun berturut-turut, sehingga untuk posisi ini beliaulah yang paling memenuhi kriteria utama. Akibat kekerasan yang dialaminya pada masa konflik, menyebabkan terganggunya saraf di kepala korban. Kronologisnya pada masa konflik beliau pergi ke Kota Sabang untuk suatu tujuan, namun tidak/lupa melapor kepada pos aparat keamanan (sekitar tahun 2003-2004), kemudian saat kembali pulang ke *gampong* halamannya (Data Makmur) diketahuilah oleh pihak aparat keamanan yang kemudian berujung pada terjadinya kekerasan terhadap korban. Hasil wawancara dengan salah seorang tetua *gampong* berinisial SNU pada pertengahan bulan Agustus 2014.

keluarganya, maka masyarakatpun tidak mempersoalkan hal tersebut. Meskipun hal ini pada akhirnya merugikan bagi warga dalam hal menerima pelayanan dari aparat pemerintah (berstatus PNS) yang ditempatkan di *gampong* tersebut.

Terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat di *gampong* Data Makmur ini lebih didominasi oleh geuchik, yang semestinya kepemimpinan *gampong* yang ideal terdiri dari 3 serangkai yaitu geuchik, sekdes, dan teungku imeum *meunasah*. Sementara *tuha peut* mengambil posisi sebagai legislator dan menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan masukan, saran maupun kritikan konstruktive terhadap kepemimpinan *gampong*. Kondisi ini sangat berpengaruh pada efektif tidaknya sebuah pemberdayaan yang dilakukan pascakonflik di *gampong* Data Makmur ini. Sehingga yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah roda pemerintahan *gampong* tidak berjalan dengan baik yang berakibat pada kurang (untuk mengganti kata tidak) efektifnya pemberdayaan masyarakat di *gampong* Data Makmur pascakonflik dan terlebih lagi dalam memanfaatkan *meunasah* sebagai basis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pascakonflik di *gampong* Data Makmur tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini salah satunya dikarenakan dampak konflik masih dirasakan oleh warga masyarakat terutama bagi warga yang menjadi korban kekerasan di masa konflik melanda daerah ini. Selain itu, lumpuhnya kegiatan di *meunasah* yang diakibatkan tidak harmonisnya struktur *gampong* dalam hal ini tidak adanya orang yang mengurus *meunasah*

(tidak adanya teungku imeum *meunasah*) menjadi masalah serius dalam pemberdayaan masyarakat pascakonflik di *gampong* Data Makmur. Sejatinya pemberdayaan terhadap masyarakat pascakonflik dapat berjalan dengan baik, karena masyarakat sudah merasakan kembali keamanan dan kenyamanan yang selama konflik tidak pernah mereka rasakan. Meskipun demikian juga masih ada hal positif yang dapat kita ambil hikmahnya, diantaranya adalah lahirnya balai pengajian (*balee suemeubeut*) yang kemudian menjadi media pemberdayaan bagi masyarakat berupa upaya transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan transfer nilai (*transfer of value*) bagi generasi bangsa.

#### **D. Penutup**

Pascakonflik yang melanda Aceh, terutama di *gampong* Data Makmur telah meninggalkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik itu dampak fisik maupun mental/psikis (kejiwaan). *Meunasah* mulai ditinggalkan para jamaah, hal ini selain disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia yang terbatas juga dikarenakan adanya pengurus di struktur pemerintahan *gampong* yang kurang harmonis. Sehingga hal ini berpengaruh pada merenggangnya silaturahmi dan kebersamaan warga, yang berdampak pada pembangunan *gampong* secara lebih menyeluruh.

Pemberdayaan masyarakat pascakonflik di *gampong* Data Makmur tidaklah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan dampak konflik masih dirasakan oleh warga masyarakat, dan lumpuhnya kegiatan di *meunasah* yang diakibatkan

kurang harmonisnya pengurus dalam struktur *gampong* sehingga mengganggu kegiatan pemberdayaan masyarakat pascakonflik di *gampong* Data Makmur di saat itu. Untuk itu, beberapa saran peneliti sebagai salah satu sumbangan penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepada masyarakat *gampong* Data Makmur agar senantiasa menjaga dengan baik dan terus berusaha untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat *gampong* dalam berbagai kegiatan, termasuk melakukan berbagai inovasi agar silaturahmi dan kebersamaan antara sesama warga *gampong* dapat lebih dipererat lagi dalam membangun *gampong* menjadi lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
- b. Secara lebih khusus perlu segera melakukan penguatan terhadap masyarakat *gampong* dalam mengelola *meunasah* secara proporsional dan professional, dan kepada pihak pemerintah baik di level Kecamatan Blang Bintang maupun Kabupaten Aceh Besar untuk dapat membantu memfasilitasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Dalam pembangunan dan atau pemberdayaan terhadap masyarakat pasca konflik, baik vertikal maupun horizontal memerlukan pendampingan secara lebih khusus dan lebih serius. Hal ini disebabkan kondisi

masyarakatnya yang masih labil dan masih rentan terhadap munculnya konflik baru, maupun bangkitnya kembali sisa-sisa konflik lama dalam wujud yang berbeda.

- d. Kepada Pemerintah Aceh secara umum dan pemerintah Kabupaten/Kota secara lebih khusus untuk sesegera mungkin melakukan revitalisasi terhadap *meunasah* dalam membangun peradaban Aceh yang lebih baik di masa mendatang. *Meunasah* haruslah menjadi benteng utama yang akan mengawal masyarakat *gampong* dari berbagai rongrongan pengaruh negative dari luar, serta menjadi benteng dalam pewarisan *culture* keacehan yang identik dengan tradisi keislaman.

Selanjutnya, kepada para peneliti juga perlu kiranya melakukan kajian ulang tentang pemberdayaan masyarakat di bekas daerah konflik secara khusus Aceh dengan kearifan lokalnya setelah 15 tahun Aceh damai yaitu sekitar tahun 2020, dalam cakupan lokasi penelitian yang lebih luas sehingga diharapkan akan menemukan dinamika baru dalam pemberdayaan masyarakatnya, serta menemukan model terbaik dalam berbagai aktifitas pemberdayaan masyarakat serta mampu memberikan sumbangsih bagi keilmuan dibidang kesejahteraan sosial masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Consuelo G. Sevilla dkk. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press.
- Edi Suharto, (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Koentjaraningrat, (1985). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramadia.
- M. Burhan Bungin, (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
- M. Iqbal Hasan, (2002). *Pokok-Pokok Materi: Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Quraisy Syihab, (1995). *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-10, Bandung: Mizan.
- P. Joko Subagyo, (1999). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, (2010). *Blang Bintang dalam Angka 2010*, Aceh Besar: Sekretariat Daerah Aceh Besar.
- Purwanto, (2007). *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto, (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman Tripa, *Meunasah di Aceh*, dalam: [www.acehinstitute.org/meunasah](http://www.acehinstitute.org/meunasah), diakses pada tanggal 03 Juli 2008.
- Sutrisno Hadi, (2000). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wrihatnolo Randy R., D. Riant Nugroho, (2007). *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk*

*Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media  
Komputindo.